

Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Upah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Propinsi Sulawesi Selatan

***Muhammad Azizi¹**

Departemen Ekonomi dan Bisnis Universitas Tomakaka¹

¹muhazizi@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis dan mengetahui apakah variabel tingkat pendidikan, tingkat upah dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Propinsi Sulawesi Selatan. dan Untuk mendapatkan data yang akurat tentang variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Propinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan (library research), dengan pengamatan pada tahun 1999-2008, data tersebut didapatkan pada Kantor Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan, serta Kantor Bappeda masing-masing Kabupaten/Kota di Luwu Raya, serta Kantor BPS Propinsi Sulawesi Selatan. Analisis Regresi Linier digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas tingkat pendidikan, tingkat upah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap variabel terikat penyerapan tenaga kerja di Propinsi Sulawesi Selatan dalam masa 1999-2008. Di antara ke tiga variabel bebas tersebut, nampaknya tingkat upah merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja di Propinsi Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk senantiasa memperhatikan tingkat pendidikan masyarakat, besarnya upah yang diterima serta upaya-upaya pengembangan berbagai sektor ekonomi di daerah ini sehingga pertumbuhan ekonomi dapat semakin meningkat yang pada akhirnya penyerapan tenaga kerja semakin besar serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Kata Kunci: Pendidikan, upah, pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja

I. Pendahuluan

Suatu yang disadari sepenuhnya bahwa penduduk merupakan unsur penting dalam proses pembangunan. Bahkan tidak sedikit ahli yang menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa - bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Selain

itu, dalam usaha meningkatkan produksi dan pengembangan kegiatan ekonomi, penduduk memegang peranan sangat penting karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan sebagai tenaga usahawan yang dapat menciptakan kegiatan ekonomi. (Mulyadi S, 2002;34) Namun, pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan pembangunan ekonomi akan menimbulkan masalah tersendiri bagi sebuah negara atau daerah. Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan yang dimilikinya. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru. Meskipun demikian, ada juga beranggapan bahwa jumlah penduduk yang besar bagi suatu negara juga bisa sebagai pemacu pembangunan (positif), yaitu sebagai pasar yang potensial bagi barang-barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat itu sendiri, sumber tenaga kerja murah yang sangat diperlukan bagi proses pembangunan, dan dapat meningkatkan produksi karena dengan semakin banyaknya orang-orang yang berkarya. Berdasarkan laporan Tahunan BPS mengenai jumlah penduduk yang ada di Sulawesi Selatan, cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2004, jumlah penduduk di Sulawesi Selatan mencapai 7.379.370 jiwa, kemudian tahun 2006 berjumlah 7.629.689. Dan pada tahun 2008 mencapai 7.771.671. Untuk lebih rincinya perhatikan tabel di bawah ini

Tabel 1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Sulawesi Selatan Tahun 2004 – 2008

Tahun	Jumlah Penduduk	Prosentase (%) Laju Pertumbuhan Penduduk tahun
2004	7,379,370	1,45
2005	7,495,705	1,56
2006	7,629,689	1,77
2007	7,675,893	0,60
2008	7,771,671	1,32

Sumber: BPS, Prop. Sulsel 2011

Melihat perkembangan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini seharusnya menjadi sebuah masalah karena tentu saja akan berimplikasi pada semakin banyaknya jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja, baik yang terlibat dalam proses ekonomi maupun yang tidak. Atau dengan kata lain semakin bertambahnya jumlah orang pencari kerja, menganggur. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sekitar 311.766 pekerja atau berkurang sekitar 61 ribu penganggur dibanding tahun 2007 yang sekitar

372.714 penganggur. Sebenarnya kalau melihat data yang dipublikasikan mengenai kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan, cukup mengalami perkembangan positif. Seperti tingkat penyerapan kerja/ orang yang bekerja tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2006, jumlah penduduk yang bekerja sekitar 2.838.632 jiwa, tahun 2007 meningkat 1.91 persen menjadi 2.893, 946, kemudian tahun 2008 meningkat 7.72 persen menjadi 3.136.111. Begitupun dengan tingkat kemiskinan, yang tiap tahunnya mengalami pengurangan. Tahun 2007 tercatat jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan 1.08 juta jiwa, kemudian tahun 2003 berjumlah sekitar 1.03 juta jiwa. berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 51.700 orang. Berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 51.700 orang. (BPS Sulsel 2009).

Adapun perkembangan jumlah penduduk yang bekerja di Propinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2004-2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan Yang Bekerja (jiwa) Tahun 2004-2008

Tahun	Penduduk yang bekerja (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2004	2.823.369	-
2005	2.728,677	(3.47)
2006	2.838.632	3.87
2007	2.893, 946	1.91
2008	3.136.111	7.72

Sumber: BPS Sulsel dalam angka tahun 2008

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang nantinya akan berefek terhadap banyaknya jumlah orang yang bekerja maka perlu adanya upaya menggalakkan program yang memotivasi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan keterampilan dan keahlian calon tenaga kerja. Harapan besar adanya kebijakan pemerintah yang sinergis dengan kebutuhan masyarakat. Dengan hal tersebut diharapkan mampu mendorong angkatan kerja yang terus meningkat untuk ikut terlibat dan berpartisipasi secara penuh dan mandiri dalam kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan yang mereka peroleh dalam mencapai kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik. Pendidikan merupakan upaya real dalam rangka menaikkan mutu sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja. Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk memenuhi kecerdasan kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia dalam suatu Negara atau daerah akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi, karena manusia pelaku aktif yang dapat mengakumulasikan modal, mengeksploitasikan berbagai sumber daya, serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi pembangunan, Pendidikan merupakan bentuk investasi

sumber daya manusia yang mungkin lebih penting dan investasi modal fisik, Ditemukan dalam berbagai penelitian di sejumlah negara, pendidikan memberikan sumbangan yang amat besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah berkembangnya kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, keterampilan, keahlian, kemampuan dan wawasan mereka agar mampu bekerja lebih produktif baik secara perorangan maupun kelompok.

Sementara yang tamat SD sebesar 27,02 persen, tamat SLTP 18.69 persen, tamat SLTA 18,69 person, dan yang menamatkan Akademi/Univesitas sebesar 6,22 persen. Melihat perkembangan persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan di Sulawesi Selatan, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun persentase penduduk 10 tahun ke atas meurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Persentase penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sulawesi Selatan

Tahun	SD %	SLTP %	SLTA %	AK/UNIV.
2004	26.71	13.55	10.42	2.81
2005	28.14	15.1	19.57	4.77
2006	27.03	15.98	19.57	5.78
2007	26.71	15.26	18.24	6.32
2008	27.02	15.95	18.69	6.22

Sumber: BPS, Prop. Sulsel 2009 (Susen,2004-2008)

Sekaitan dengan penelitian ini, maka tingkat pendidikan yang dimaksudkan adalah jenjang pendidikan yang telah ditamatkan oleh angkatan kerja sesuai dengan aturan ketenagakerjaan (SLTP ke atas). Pembangunan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi diharapkan agar kegiatan perekonomian akan menjadi luas yang artinya menuntut keterlibatan angkatan kerja untuk ikut tertibat, dalam kegiatan ekonomi tersebut sehingga menyebabkan tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat. PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2006 sebesar 38.867,68 milyar rupiah atau meningkat sekitar 6,71 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2005. Di samping itu, tingkat upah yang ditetapkan dalam suatu wilayah juga ikut berpengaruh terhadap tingkat penyerapan dan produktifitas tenaga kerja. Untuk itu Pemerintah berkepentingan untuk menetapkan kebijakan pengupahan, di satu pihak untuk tetap dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di lain pihak, kebijakan pengupahan harus dapat menstimulasi investasi untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta mampu menahan laju inflasi. Persoalan upah ini, menjadi suatu fenomena menarik yang juga berpengaruh dalam membicarakan tingkat penyerapan tenaga kerja baik pada skala lokal maupun skala nasional

II. Tinjauan Pustaka

Secara keseluruhan beberapa tahun terakhir ini, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi berbagai tekanan, baik menghadapi kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan maupun tekanan yang timbul paska tragedi bom Bali. Namun peningkatan stabilitas ekonomi dan kinerja perbankan belum berhasil mempercepat proses pemulihan ekonomi. Hal ini terutama terkait dengan pertumbuhan investasi dan ekspor yang kurang menggembirakan. Konsistensi kebijakan moneter dalam mengendalikan berbagai besaran moneter dan kedisiplinan pengelolaan kebijakan fiskal serta didukung oleh beberapa kemajuan yang dicapai dalam restrukturisasi ekonomi, telah memberikan iklim yang kondusif bagi stabilitas ekonomi. Kestabilan tersebut antara lain tercermin pada tingkat inflasi yang turun cukup tajam dan nilai tukar rupiah yang menguat secara signifikan dengan pergerakan yang stabil. Terkendalnya nilai tukar dan laju inflasi memberikan ruang gerak bagi kebijakan moneter untuk secara bertahap menurunkan suku bunga SBI dalam rangka memberikan sinyal yang positif bagi proses pemulihan ekonomi. Sinyal penurunan suku bunga SBI tersebut diikuti dengan penurunan suku bunga simpanan perbankan secara signifikan, namun belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan.

Meskipun belum optimal, iklim yang positif melalui penurunan suku bunga ini telah dimanfaatkan oleh perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit, memperkuat struktur permodalan, dan meningkatkan penyaluran kredit, terutama yang berjangka waktu relatif pendek. Di sektor riil, kondisi moneter yang stabil telah memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk melakukan restrukturisasi keuangan secara internal serta membantu masyarakat dalam mempertahankan tingkat konsumsinya. Penurunan suku bunga juga telah mendorong perusahaan yang mempunyai reputasi baik untuk mencari alternatif pembiayaan dari pasar keuangan. Berbagai permasalahan internal dan eksternal masih menghambat pemulihan kegiatan investasi dan ekspor. Di sisi internal, masih dijumpai permasalahan struktural antara lain menyangkut masalah ketidakpastian di bidang hukum, regulasi investasi dan perburuhan, otonomi daerah, peran yang tumpang tindih (penyatuan), serta faktor keamanan dalam negeri yang belum kondusif. Sementara itu, di sisi eksternal juga terdapat kendala berupa ketidakpastian perekonomian global dan meningkatnya persaingan di Asia dalam menarik investasi asing. Dalam rangka memperoleh pembahasan yang mendalam mengenai masalah yang berhubungan dengan kajian tentang tingkat pendidikan, tingkat upah dan

pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan, terlebih dahulu penulis mengemukakan beberapa landasan teori

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja (man power) merupakan bagian dari penduduk pada kelompok umur tertentu yang diikutsertakan dalam proses ekonomi. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batas umur. Tujuan pemilihan batas umur adalah agar defenisi yang diberikan dapat menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja pada masing-masing negara juga berbeda Batasan umur yang digunakan di Indonesia saat ini adalah 10 tahun ke atas (Arfida, 2003; 45). Di Indonesia, pengertian tenaga kerja atau man power adalah mencakup penduduk yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir, yakni pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. (P. Simanjuntak,1985; 43). Istilah tenaga kerja selalu dikaitkan dengan jumlah para pekerja sebenarnya atau potensial yang tercakup di dalam suatu penduduk. Tenaga kerja biasanya diukur menurut unit orang yang terdapat didalamnya, dan bukan dari segi unit pekerjaan. Karena kegiatan pekerjaan senantiasa mengalami perubahan yang kontinu, semua kegiatan tersebut harus dihitung pada suatu saat tertentu, dan sedapat mungkin menurut jangka waktu yang sama atau yang singkat.

Menurut Dumairy (2005,32), pengertian tenaga kerja ialah penduduk yang berumur dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 10 tahun, tanpa batas umur Jadi, setiap setiap orang atau penduduk yang sudah berusia 10 keatas, tergolong sebagai tenaga kerja. di negara India menggunakan rentang usia antara 14 sampai 60 tahun sebagai batas usia kerja. Amerika Serikat, batas minimum usia kerja adalah 16 tahun tanpa batas umur maksimum. Sedangkan batas usia kerja menurut Bank Dunia adalah antara umur 15 sampai 64 tahun. Selanjutnya Matra (2004,65) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Secara umum pengukuran ketenagakerjaan dapat didekati dengan dua cara, yaitu : (1) gainful worker approach dan (2) labour force appoach. Dalam gainful worker approach, seseorang yang dikategorikan tenaga kerja akan ditanyakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam kurung waktu tertentu. Seseorang yang biasanya

sekolah, tetapi saat survey sedang mencari pekerjaan, maka *gainful worker approach* akan dimasukkan dalam kategori sekolah. Maka informasi mengenai pengangguran banyak yang hilang.

Menurut Simanjuntak (1998,76), tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Mulyadi (2003,54) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat Statistik (2008,76) dan sesuai dengan yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO) adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Pada awalnya batasan umur penggolongan tenaga kerja di Indonesia sejak tahun 1971 adalah bilamana seseorang sudah berumur 10 tahun atau lebih. Pemilihan batasan umur ini berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk bekerja atau mencari pekerjaan. Dengan bertambahnya kegiatan pendidikan dan penetapan kebijakan wajib belajar 9 tahun, maka jumlah penduduk dalam usia sekolah yang bekerja berkurang. Oleh karena itu, semenjak dilaksanakan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) tahun 2001, batas umur penggolongan kerja yang semula 10 tahun atau lebih dirubah menjadi 15 tahun atau lebih. Indonesia tidak menggunakan batas umur maksimum dalam pengelompokan usia kerja karena belum mempunyai jaminan sosial nasional. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan bekerja serta golongan menganggur dan mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai angkatan kerja potensial (*potensial*

labor force).

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo (2005,56) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, jumlah penduduk yang banyak tidak selalu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan.

Usia Kerja adalah suatu tingkat umur seseorang yang diharapkan sudah dapat bekerja dan menghasilkan pendapatannya sendiri. Usia kerja ini berkisar antara 14 sampai 55 tahun. Selain penduduk dalam usia kerja, ada juga penduduk di luar usia kerja, yaitu di bawah usia kerja dan di atas usia kerja. Penduduk yang dimaksud yaitu anak-anak usia sekolah dasar dan yang sudah pensiun atau berusia lanjut. Bagian lain dari penduduk dalam usia kerja adalah bukan angkatan kerja. Yang termasuk di dalamnya adalah para remaja yang sudah masuk usia kerja tetapi belum bekerja atau belum mencari pekerjaan karena masih sekolah. Ibu rumah tangga pun termasuk ke dalam kelompok bukan angkatan kerja.

2. Tingkat Pendidikan

Menurut UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat 1 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan Nasional menurut UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat 2 adalah pendidikan yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sehubungan dengan itu, sebagaimana amanat UU Sisdiknas 2003 Pasal 3, fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok *orang* yang diusahakan mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, latihan, proses perbuatan dengan cara mendidik mereka. Pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan formal atau resmi yaitu segenap bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisir dan berjenjang melalui tingkatan-tingkatan secara teratur baik bersifat umum maupun khusus. Pendapat lain tentang pengertian pendidikan dikemukakan oleh Sumitro (2005,33) bahwa; "Pendidikan adalah proses dalam mana potensi-potensi, kemampuan-kemampuan, kapasitas - kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan alat (media) yang disusun sedemikian rupa, dan digunakan oleh manusia untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian pendidikan bila dikaitkan dengan penyiapan tenaga kerja menurut Umar Tirtarahardja (2004, 45), "Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja". Selanjutnya Soedarmayanti (2001, 44) menyatakan bahwa melalui pendidikan, seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap, tahu, mengenal, dan mengembangkan metode berpikir secara sistematis agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari.

Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau Karena falsafah yang melandasinya. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam suatu daerah atau wilayah dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas manusia sumber daya manusia sangat tergantung dan system dan kualitas pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula Kualitas sumber daya manusianya, Berdasarkan pengalaman pembangunan di Negara-Negara maju, faktor pendidikan merupakan variabel yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kemandirian bangsa. Meningkatkan mutu pendidikan penduduk, maka berarti

meningkatkan pula produktifitas dari tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pula kemampuan produksinya. Dengan semakin baik produktifitas seseorang tenaga kerja, maka diharapkan kesejahteraannya semakin meningkat pula. Hal ini terutama disebabkan karena semakin bagus produktifitas seseorang diharapkan berkorelasi langsung dengan semakin baiknya produktifitas perusahaan yang memberikannya upah untuk menggapai kesejahteraan tersebut.

3. Tingkat Upah

Teori neoklasik menganggap bahwa upah tenaga kerja ditentukan oleh permintaan tenaga kerja, yang diwakili oleh nilai produk fisik marjinal. Analisis neoklasik, memandang upah ditentukan oleh interaksi permintaan (utilitas) dan penawaran (biaya produksi) tenaga kerja. Suatu kesimpulan penting dari teori neoklasik adalah ekonomi berada pada keseimbangan pada penggunaan tenaga kerja penuh. Penganut paham ini percaya akan adanya pengangguran, mereka menganggap bahwa pengangguran sebagai gejala ketidakseimbangan (Mardiana, 1990;54). Salah satu teori tentang keseimbangan pengangguran adalah konsep upah ketat dan tidak fleksibel. Menurut teori ini, upah tidak dapat bereaksi terhadap kelebihan penawaran tenaga kerja, yang berpengaruh adalah tingkat upah yang ada menjadi suatu variabel tertentu. Perlakuan tingkat upah sebagaimana ditentukan diluar sistem ekonomi makro membuka jalan bagi perkembangan dan penerimaan dan teori nonekonomi tentang penentuan upah. Teori-teori ini berkisar antara paham institusionalis hingga pendekatan yang bercorak adu untung. Pengertian upah di Indonesia berdasarkan pasal 1 angka 30 Undang- Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Mursidin, 2006 :44).

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan bahkan jika tidak profesional dalam menangani masalah pengupahan, maka sering berpotensi timbulnya perselisihan dan mendorong timbulnya unjuk rasa, Penanganan pengupahan tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum (Mursidin, 2006;56). Aspek teknis pengupahan meliputi perhitungan dan pembayaran upah, serta proses upah ditetapkan. Mulai dari penetapan upah minimum propinsi (UMP), upah minimum sektora! propinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten. Kota (UMSK), dan upah sundulan. Aspek ekonomis pengupahan lebih melihat pada kondisi ekonomi secara makro dan mikro, yang secara operasional mempertimbangkan kemampuan perusahaan pada saat nilai upah akan

ditetapkan. Bagi perusahaan, upah merupakan biaya produksi sehingga kenaikan upah minimum mendorong produktivitas kerja pekerja. dan tidak terlalu membebani perusahaan, Aspek hukum pengupahan meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah perhitungan dan pembayaran upah, serta pengawasan pelaksanaan ketentuan upah. Berdasarkan perspektif pengusaha, upah adalah pengeluaran perusahaan untuk kesejahteraan pekerja yang merupakan bagian biaya produk yang dihasilkan, yang akhirnya akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan Anggaran untuk biaya tenaga kerja berasal dari penerimaan perusahaan sehingga anggaran untuk biaya tenaga kerja sangat bergantung pada kelancaran penerimaan perusahaan. Oleh karena itu berdasarkan pandangan pengusaha pembayaran upah yang tinggi dapat dilakukan tetapi harus seimbang dengan produktivitas pekerja.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologi terhadap berbagai tuntutan Keadaan yang ada (Sugiman, 2000, 33). Selanjutnya dijelaskan bahwa kenaikan output yang secara berkesinambungan yang terkandung dalam definisi tersebut adalah perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (economic maturity) di suatu Negara yang bersangkutan. Menurut pendapat lain pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang artinya yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Sedangkan aspek yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Kemudian aspek ketiga adalah perspektif waktu jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama (10, 20,50 tahun bahkan lebih lama lagi) mengalami kenaikan output perkapita. Oleh karena itu proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat self-generation yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu menghasilkan kekuatan bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya (Sugiman, 2000;45). Berdasarkan dua pengertian pertumbuhan ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan

ekonomi dapat terjadi jika suatu negara atau suatu daerah mampu menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya, akibat dari hasil penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam jangka panjang dan pada akhirnya akan diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita. Oleh karena itu angka total pendapatan perkapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu negara (Sugiman, 2000; 67).

Berbicara mengenai pendapatan regional perkapita adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga biaya faktor dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada umumnya indikator ini disajikan dari angka atas dasar harga berlaku, walaupun sebenarnya masih mengandung perubahan harga barang dan jasa, nilai tambah yang ditetapkan masing-masing penduduk akibat dan adanya aktivitas ekonomi. Setiap sektor kegiatan ekonomi tersebut dapat diukur dan diketahui perkembangannya melalui perhitungan Produk Domestik Bruto (PDRB) untuk skala regional dan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional pada setiap waktu dan periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menurut Sastro (2004,33) bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap, yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan produksi. Dan hal tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung perkembangan ekonomi dalam teknik produksi yang digunakan oleh masyarakat, dan perubahan tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat pula dipandang sebagai perluasan kesempatan kerja melalui perluasan unit - unit ekonomi produktif yang dapat membuka kesempatan kerja. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sastro (2004,44) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (economic growth) dapat dipandang sebagai suatu proses ekspansi atau perbaikan ekonomi dan produktifitas dan sumber daya yang tersedia seperti sumber daya alam, tenaga kerja dan benda-benda modal (kapital). Pengertian di atas menunjukkan dasar dari pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi yaitu adanya perluasan dan pengembangan sumber daya atau faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan keahlian. Keterpaduan dan pengelolaan faktor-faktor tersebut akan lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur melalui pendapatan masyarakat.

III. Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Sulawesi Selatan serta Kantor Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kaitan antara tingkat pendidikan, tingkat upah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi atau yang dikenal dengan library reseach, hal ini disebabkan karena data yang digunakan dalam merupakan data

sekunder dari instansi, lembaga atau sumber-sumber lain yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif regresi berganda serta dengan pendekatan statistik deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Sulawesi Selatan serta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Model analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan atau karakteristik variabel penelitian adalah (*Mix Methods*).

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

A. Aspek Demografi

Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi dan modal pembangunan apabila diimbangi dengan daya dukung ekonomi dan sosial yang kuat, tetapi akan menjadi penghambat pembangunan apabila hal ini tidak dapat dipenuhi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propensi Sulawesi Selatan selama periode 1999-2008 mengalami peningkatan. Pada tahun 1999 jumlah penduduk sebanyak 7.978.435 jiwa, kemudian pada tahun 2000 jumlah penduduk mengalami penurunan dengan jumlah 7.801.678 jiwa. Pada tahun 2001 hingga 2004 jumlah penduduk mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan alamiah atau tingkat kelahiran yang masih relatif tinggi serta akibat migrasi, Dan untuk menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk, pemerintah melakukan program keluarga berencana. Dengan melalui program ini diharapkan pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Pada tahun 2005 jumlah penduduk kembali mengalami penurunan dengan jumlah penduduk sebanyak 7.494,701 jiwa, namun pada tahun 2006 hingga 2008 peningkatan jumlah penduduk kembali terjadi. Hingga tahun 2008 jumlah penduduk yang berada di Sulawesi Selatan berjumlah 7.805.024 jiwa. Selanjutnya untuk melihat jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Propinsi Sulawesi Selatan tahun 1999-2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1999-2008

Tahun	Jumlah penduduk	% Pertumbuhan
1999	7.978.435	-
2000	7.801.678	-2,27
2001	7.891.792	1.14

2002	7.960.991	0,87
2003	8.213.864	3,08
2004	8.342.083	1,54
2005	7.494.701	-11,31
2006	7.629.138	1,76
2007	7.675.893	0,61
2008	7.805.024	1,65

Sumber: BPS Sulawesi Selatan 1999-2008

Bila dilihat dari tabel di atas, dapat dikatakan bahwa persentase pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan selama periode 1999-2008 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2000 pertumbuhan penduduk mengalami penurunan sebesar -2,21 persen. Pada tahun 2001 jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1,14 persen. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2003 dengan persentase pertumbuhan sebesar 3,08 persen, sedangkan penurunan pertumbuhan penduduk terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 11,31 persen.

B. Aspek Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan pendidikan. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja serta kurangnya jiwa kewirausahaan dari para pencari kerja akan menimbulkan pengangguran. Faktor lain yang ikut mendukung timbulnya pengangguran antara lain adanya pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan/lapangan kerja sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Disamping itu, adanya ketidakmampuan sektor industri dalam manampung kelebihan tenaga kerja akan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Penduduk usia kerja (PUK) dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu golongan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berdasarkan data badan pusat statistik Sulawesi Selatan tahun 1999-2008, dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja masih lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah bukan angkatan kerja. Selama periode itu pula persentase pekerja mengalami peningkatan, pada tahun 1999 jumlah angkatan kerja sebanyak 3.240.449 jiwa dan pada tahun 2000 jumlah angkatan kerja tersebut mengalami penurunan berjumlah 2.961.531 jiwa dengan persentase pekerja terhadap angkatan kerja sebesar 47,68 persen. Pada tahun berikutnya jumlah tersebut kembali mengalami kenaikan menjadi 3.137.274 jiwa dengan persentase 50,91 persen. Dari tahun 2002 hingga 2008 peningkatan jumlah angkatan kerja mengalami fluktuatif dalam jumlah angkatan kerja tersebut.

Tabel. 5 Perkembangan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1999-2008

Tahun	Perkembangan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja		
	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah PUK
1999	3.240.449	3.055.298	6.295.747
2000	2.961.531	3.249.959	6.211.490
2001	3.137.274	3.025.776	6.163.050
2002	3.143.849	3.141.681	6.285.530
2003	3.279.832	3.245.276	6.525.108
2004	3.059.053	2.820.987	5.880.040
2005	3.234.801	2.723.968	5.958.769
2006	3.005.723	2.251.560	5.257.283
2007	3.312.177	2.111.226	5.423.403
2008	3.447.879	2.111.869	5.559.748

Sumber: BPS Sulawesi Selatan 1999-2008

Selanjutnya dapat dilihat bahwa selama periode 1999-2008 jumlah angkatan kerja yang terserap pada lapangan kerja di Propinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 1999 tercatat bahwa jumlah orang yang terserap kerja atau bekerja sebesar 2.635.414, tahun 2000 sebesar 2.543.143, tahun 2001 sebesar 2.001.375, tahun 2002 meningkat sebesar 2.918.149, tahun 2006 sebesar 2.738.632, dan pada tahun 2008 jumlah orang yang terserap kerja sebesar 3.136.111 jiwa.

Tabel 6. Jumlah penduduk Sulawesi Selatan yang Bekerja (Jiwa) Tahun 1999-2008

Tahun	Penduduk yang Bekerja (Y)	Pertumbuhan
1999	2,335,441	-
2000	2,543,143	8.89
2001	2,701,375	6.22
2002	2,918,149	8.03
2003	2,754,774	-5.60
2004	2,823,369	2.49
2005	2,728,677	-3.35
2006	2,838,632	4.02
2007	2,893,946	1.95
2008	3,136,111	8.37

Sumber: BPS Sulawesi Selatan 1999-2008

Memperhatikan jumlah orang yang terserap kerja di Sulawesi Selatan periode 1999-2008 cenderung fluktuatif. Namun kalau kita lihat jumlah orang yang terserap kerja tiga tahun terakhir (2006-2008) mengalami peningkatan. Tentu saja kondisi ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti tingkat pendidikan, tingkat upah, pertumbuhan ekonomi yang ada di

Sulawesi Selatan.

C. Tingkat Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya akan memberikan sumbangan yang sangat berharga pada orang yang sempat memperolehnya, karena pendidikan akan memberi bakat kelak bila suatu waktu ilmu yang diperoleh dari pendidikan tersebut akan disumbangkan. Tenaga kerja tanpa ilmu sangat sulit menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di tempat kerja. Namun bukan berarti bahwa dengan adanya perolehan ilmu dari pendidikan formal akan menjamin angkatan kerja tersebut tersaring dalam bursa pasar kerja. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dalam suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Selama tahun 1999 - 2008 terlihat adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari pergeseran persentase dari pendidikan yang rendah ke pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini terlihat pada table 4.4 berikut ini:

Tabel 7. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan. Yang Ditamatkan di Sulawesi Selatan Tahun 1999-2008

No	Tahun	tps/ttsd	SD	SLTP	SLTA	AK/ UNIV	% Peddk yang tamat SLTP ke atas
1	1999	26.34	26.91	13.09	16.25	3.16	32.5
2	2000	34.88	26.38	12.78	21.62	4.39	38.79
3	2001	36.66	25.7	11.85	17.87	3.91	33.63
4	2002	37.58	28.05	14.26	16.77	3.34	34.37
5	2003	36.91	28.39	14.36	16.93	3.35	34.64
6	2004	32.76	26.71	13.55	10.42	2.81	26.78
7	2005	35.19	28.14	15.1	19.57	4.77	39.44
8	2006	31.67	27.03	15.98	19.57	5.76	41.31
9	2007	33.46	26.71	15.26	18.24	6.32	39.82
10	2008	34.09	27.02	15.95	18.69	6.22	40.86

Sumber: BPS Sulawesi Selatan 1999-2008

Dan table di atas terlihat bahwa selama periode penelitian dari tahun 1999-2008 terjadi kecenderungan peningkatan persentase yang ditamatkan oleh Angkatan kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, khususnya pendidikan SLTP ke atas. Pada tahun 1999 persentase angkatan kerja yang menamatkan pendidikan SLTP ke atas sekitar 32.5 persen. Tahun 2003 sebesar 34.64 persen, kemudian tahun 2007 sebesar 39.82 persen dan kemudian tahun 2008 menjadi 40.86 persen. Mengamati perkembangan angka-angka persentase untuk jenjang pendidikan SLTP ke atas yang

cenderung mengalami peningkatan. Ini bisa saja akibat dari semakin sadarnya masyarakat Sulawesi Selatan akan pentingnya pendidikan.

D. Tingkat Upah

Upah minimum regional (UMR) sebagai penghasilan yang diterima bagi para karyawan atau pegawai telah ditetapkan standarnya oleh pemerintah. Berdasarkan data dari badan pusat statistik Sulawesi Selatan tahun 2008, standar ketetapan UMR dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kenaikan ini dikarenakan semakin besarnya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi masyarakat dari tahun ke tahun. Perhatikan tabel tentang upah minimum regional(UMR)/upah minimum propinsi di Sulawesi Selatan tahun 1999-2010. Berdasarkan tabel ini nampak bahwa upah minimum regional atau upah minimum propinsi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 1999 upah minimum regional di Sulawesi Selatan sebesar Rp. 129.000,-/perbulan dan kemudian terjadi peningkatan sebesar 55,03 persen menjadi Rp.200.000,-/bulan pada tahun 2000. Pada tahun 2001 kenaikan kembali terjadi sebesar 50 persen yakni Rp.300.000,-/bulan. Pada tahun 2002-2007 kenaikan upah minimum regional terus mengalami kenaikan, meskipun persentasenya mengalami fluktuatif. Hingga tahun 2008 kenaikan upah minimum regional mencapai 34,47 persen atau sebesar Rp. 905.000,-/bulan.

Tabel. 8. Upah Minimum Regional (UMR)Upah Minimum Propinsi (UMP) di Sulawesi Selatan Tahun 1999-2008

Tahun	Upah Minimum Regional (Rupiah)	
	UMR Per Hari	UMR Per Bulan
April 1999	5.160	129.000
April 2000	8.000	200.000
April 2001	12.000	300.000
April 2002	15.000	375000
Januari 2003	16.000	415.000
Januari 2004	18.200	455.000
Januari 2005	20.400	510.000
Januari 2006	24.480	612.000
Januari 2007	26.928	673.000
Januari 2008	36.200	905.000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Selatan, Subbag,2011

E. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu cara untuk melihat kemajuan perekonomian adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto

merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu. Dalam penyajiannya, Produk Domestik Regional Bruto selalu dibedakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dalam penelitian ini kategori Produk Domestik Regional Bruto yang dipergunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan.

**Tabel. 9 PDRB Atas Dasar harga Berlaku dan Harga Konstan (dalam miliar rupiah)
Sulawesi Selatan Tahun 1999-2008**

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan ci'Stan
1999	24.064,89	9.631,08
2000	26.596,24	10.101,95
2001	32.098,57	10.603,66
2002	35.344,42	30.984,82
2003	39.414,65	32.627,38
2004	44.744,53	34.345,08
2005	51.780,44	36.421,78
2006	60.902,82	38.867,68
2007	69.271,92	41.332,43
2008	85.143,19	44.549,82

Sumber BPS Sulawesi Selatan 1999-2008

Dari laju pertumbuhan PDRB nampak bahwa selama periode 1999-2008 tingkat pertumbuhan riil dari produk domestik regional bruto (PDRB) mengalami fluktuatif. Pada tahun 1999 pertumbuhan riil sekitar 1,65 persen kemudian naik menjadi 3,69 persen pada tahun 2000. Pada tahun berikutnya pertumbuhan riil kembali mengalami kenaikan menjadi 3,77 persen. Sejak tahun 2002 hingga tahun 2003 terjadi penurunan pertumbuhan riil PDRB sebesar 3,42 persen dan 3,23 persen. Dan pada tahun 2004-2008 pertumbuhan riil kembali terjadi hingga mencapai 7,78 persen pada tahun 2008. Sumbangan PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan sumbangan dari sektor ekonomi berbagai lapangan usaha. Sektor-sektor tersebut meliputi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan galian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air; sektor bangunan; sektor perdagangan, restoran dan hotel; sektor angkutan dan komunikasi; sektor bank dan lembaga keuangan; sektor jasa-jasa.

2. Pembahasan

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Hal ini berarti peningkatan ataupun penurunan tingkat pendidikan yang ditamatkan (SLTP ke atas)

memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Angkatan kerja yang ada di Sulawesi Selatan umumnya berpendidikan rendah dan bahkan banyak tidak pernah mengesampingkan pendidikan formal, sehingga mereka terserap di sektor informal. Budiman (2008,31) menyatakan tingkat pendidikan yang ditamatkan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil, perdagangan dan usaha-usaha yang memerlukan kreatifitas. Semakin tinggi sekolah seseorang angkatan kerja, maka semakin besar kemungkinannya untuk bekerja atau membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Di Sulawesi Selatan, kecenderungan orang untuk menjadi pedagang ataupun pengusaha cukup besar, hal ini disebabkan oleh budaya saudagar yang telah lama tertanam di daerah ini. Dengan demikian, wajarlah kiranya jika seseorang berpendidikan baik, maka peluang untuk bekerja semakin terbuka dengan luas.

Beberapa tahun terakhir ini, upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kewirausahaan pada lembaga tinggi atau SLTA dalam rangka penciptaan lapangan usaha baru. Gazali (Pengurus Kadin Sulsel) menyatakan bahwa upaya penciptaan wirausaha baru telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya pada mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi, sehingga besar kecenderungan jika seorang berpendidikan, maka mereka dapat menciptakan lapangan kerja baru baik bagi dirinya sendiri maupun dengan teman-temannya. Tingkat pendidikan jelas berkaitan dengan dunia kerja, kecenderungan itu disebabkan karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin besar peluang itu untuk mendapatkan informasi atau peluang-peluang baru dalam hal keternagakerjaan. Dengan demikian, seorang yang berpendidikan dan telah dibekali berbagai ilmu di sekolah/perguruan tinggi akan dapat dengan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Seorang yang telah melalui tingkat pendidikan tertentu, tentunya memiliki lebih banyak relasi atau hubungan dengan orang atau semakin banyak akses ke sumber informasi. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akses untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar, persoalannya adalah apakah orang tersebut mau bekerja sesuai dengan kondisi pekerjaan yang tersedia.

2. Tingkat Upah

Hal ini sesuai dengan pendapat sutrisno (2005,43) yang menyatakan bahwa keinginan orang bekerja sangat tergantung dari besarnya pendapatan yang didapatkan, semakin besar peluang mendapatkan upah yang besar, maka semakin besar pulalah kecenderungan orang tersebut untuk bekerja. Faktor budaya, merupakan faktor yang membuat angkatan kerja kita giat mencari nafkah. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang yang bekerja dengan baik, biasanya akan mendapatkan upah yang memadai, sehingga orang mau bekerja terus untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya serta

untuk keperluan di masa yang akan datang. Upah yang baik, tentunya akan mempengaruhi kemauan orang untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Suyadi (2005,32) bahwa pertumbuhan PDRB berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi, khususnya perdagangan, konstruksi serta pertanian merupakan sector yang biasanya menjadi andalan suatu wilayah untuk menyerap tenaga kerjanya. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi dalam artian semakin membesarnya PDRB suatu daerah, tentunya akan semakin banyak lapangan usaha yang dapat terbuka, yang pada akhirnya tentunya membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan untuk itu. Dengan demikian, wajarlah kiranya jika suatu wilayah akan senantiasa mengupayakan peningkatan PDRB-nya sehingga kesejahteraan masyarakatnya semakin meningkat. Penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan, pada umumnya bekerja pada sector non formal. Banyak yang menjadi petani, pedagang ataupun sebagai pengusaha skala Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini dapat ditunjukkan dari PDRB Propinsi Sulsel yang masih menjadikan sector unggulan daerah ini. Kenyataan menunjukkan bahwa sector pertanian dalam mengangkat PDRB Sulsel memang sangat besar, misalnya dalam hal pertanian padi, daerah ini mampu menjadi sector yang mampu memproduksi padi bukan hanya dikonsumsi di dalam daerah ini, tapi dapat dikirim ke daerah lain di nusantara. Begitu pula hanya dengan perkebunan, misalnya kakao, dimana hasil pertanian ini mampu mensuplay kebutuhan nasional sampai 70%. Kesemuanya ini tentunya merupakan sector yang menyerap tenaga kerja yang besar.

V. Simpulan

Pemerintah seharusnya memberikan perhatian penuh terhadap kondisi ketenagakerjaan khususnya masalah penyerapan tenaga kerja. Karena ini menjadi pondasi dasar kesejahteraan masyarakat. Melihat data mengenai tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja di Sulawesi Selatan masih jauh dari harapan. Masih banyak angkatan kerja yang pendidikannya hanya sampai SD, bahkan banyak juga yang tidak pernah mengecap pendidikan formal. Pemerintah dalam hal ini harus menyediakan dan memberikan kesempatan ke semua kalangan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Masyarakat juga harus sadar akan penting dan perlunya pendidikan. Kiranya pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan kegiatan-kegiatan negoisasi baik dengan investor dalam maupun dengan investor luar negeri supaya menanamkan modalnya di Daerah Sulawesi Selatan, yang tentunya akan member kesempatan yang sebesar-besarnya bagi tertampungnya angkatan kerja kita. Kepada pemerhati pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan, kiranya senantiasa

malakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberi peluang sebesar-besarnya kepada angkatan kerja kita sehingga mampu bersaing dengan baik dengan tenaga kerja dari luar yang masuk ke Sulawesi Selatan. Diharapkan pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan membuka Sekolah Kejuruan, mulai dari Tingkat SLTP, sehingga angkatan kerja kita semakin mudah untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga kelak mereka dapat bekerja pada tempat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2005. Pengantar Ilmu Pendidikan. Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta
- (2007) Analisis Peran Sektor Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Jawa Timur).
- 1999-2008. Keadaan sosial Ekonomi Sulawesi Selatan. Makassar
- 1999-2008. Indikator Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan. Makassar
-(2007), Manajemen Sumber Daya Manusia, PT Bumi Aksara: Jakarta
- Achmad, Nazili.(1982).Pembangunan dan Masyarakat. Yogyakarta : CV. Bina Usaha
- Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47-62.
- Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). Economic democracy: examining the law enforcement of business competition in indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 1255-1262.
- Ananta, Aris.1993. Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Lembaga Demografi FEU!: Jakarta
- Arfida Br. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arifin, Zainal. 2004. Pendidikan Nasional sebagai Penggiring Kebudayaan Nasional UIN Sunan Klajaga Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik, 1999-2008. Sulawesi Selatan Dalam Angka. Sulawesi Selatan.
- Bakry, M., Masse, R. A., Arake, L., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). How to attract millennials? Indonesian sharia banking opportunities. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 376-385.
- Bakry, M., Syatar, A., Abubakar, A., Risal, C., Ahmad, A., & Amiruddin, M. M. (2021). Strengthening the cyber terrorism law enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic jurisdiction. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1267-1276.
- Bakry, M., Syatar, A., Haq, I., Mundzir, C., Arif, M., & Amiruddin, M. M. (2020). Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using Khusūṣ Al-Balwā. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(6), 2757-65.
- Ballante, D. and Jackson 1990. Larbour Economic: Choice In Larbour Market. Me Graw Hill Inc
- Boediono. 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
- Damirah, D. (2018). Influence Of Financial Performance Against Economic Value Added And The Impact On Market Reactions On Listing Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange. *Quest Journals Journal of Research in Business and Management*, 6(4), 13-20.
- Dian, Kustiah. 2008. Karakteristik Tenaga Kerja pada Industri Kecil di Makassar. Skripsi: Universitas Hasanuddin

- Fikri, F., Bahri, A., & Budiman, B. (2017). Islamic Inheritance Legislation Toward The National Law: The Analysis Of Justice Values In Bacukiki Parepare Society. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 17, No. 01, pp. 45-60).
- Gomes, Faustino C.(1995). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi Offset
- Hamid, A. (2022). Internalisasi Konsep Cycle Relation Model Pada Komunitas Agama Lokal di Indonesia:(Perspektif Sosial, Ekonomi dan Politik Pada Kepercayaan Towani Tolotang, Aluk Todolo dan Patuntung di Sulawesi Selatan). *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(2).
- Hanike, Y. Damirah.(2019). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Economic Value Added Pada Perusahaan Efek Indonesia Melalui Pendekatan StrukturalTRUKTURAL Equation Model– Partial Least Square| Hanike| Amal: Jurnal Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 177-191.
- Jhingan, M.L.1983. The Economic Of Development and Planning, Terjemahan D. Guritno, CV. Rajawali: Jakarta
- Mahulete. RA Mochammacl, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sulawesi Selatan, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar
- Maizan. 1985. "Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (^PAK) Wanita di Malaysia". Skripsi Universitas Hasanuddin
- Marilang; Bakry, Muammar; Arbani, Tri Suhendra; Syatar, Abdul; Amiruddin, Muhammad Majdy; Ishak, Nurfaika. (2021). Establishing Omnibus Law In Indonesia: Strict Liability In Environmental Law. *J. Legal Ethical & Regul. Isses*, 24, 1.
- Masse, R. A., Halidin, A., Amiruddin, M. M., & Marjuni, K. N. (2020). Supply Chain and Firm Performance with the Moderating Role of Leadership Dependency. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(4), 470.
- Michael P Todaro. 1991. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Terjemahan Burhanuddin Abdullah. Erlangga; Jakarta.
- Mulyadi S. 2002. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam perspektif pembangunan, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Naro, W., Abubakar, A., Syatar, A., Amiruddin, M. M., & Pallawagau, B. (2021). Have Attitudes towards Religiousness Shifted Due Covid 19 Outbreak? Evidence from Moslem Generations in Makassar-Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(3), 322-334.
- Naro, W., Abubakar, A., Yani, A., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2020). Developing learning method on post-graduated program: A blended learning based on web-blog and print technology design. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 15(5), 1404-1421.
- Naro, W., Syatar, A., Amiruddin, M. M., Haq, I., Abubakar, A., & Risal, C. (2020). Shariah assessment toward the prosecution of cybercrime in indonesia. *International Journal*, 9, 573.
- Nopirin (1994), Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro. BPFE. Yogyakarta
- Notoatmodjo.Soekidjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rineka Cipta: Jakarta
- Oumairy. 1998, Perekonomian Indonesia, Erlangga: Jakarta^
- Pabidang, Martha R. 2000. Pengaruh pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Selatan periode tahun 1989-1998. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

- Putra, A. P., & Bahri S, A. (2021). Respons Pemerintah dan Pengusaha Lokal dalam Menangani Masalah “Zero-Dollar Tourist” Cina di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 11(2), 317-336.
- Rahayu, Sri, 2003. Masalah Kependudukan di Negara Indonesia. Universitas Sumatra Utara.
- Ratih Astikurnia P. 2007. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Wanita di Kota Makassar Tahun 1995-2005. Skripsi. Universitas Hasanuddin
- Siagian P. Sondang (2002), Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, PT Asdi Mahasurya, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman, J. 2000. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, LP-FEUI, Jakarta
- Soedarmayanti. 2001. Manajemen Sumberdaya Manusia. Erlangga : Jakarta
- Sony. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia, Graha Ilmu. Yogyakarta
- Sukirno, Sadono (1981), Ekonomi Pembangunan, Borta Gorat, Medan.
- Suyadi. 2009. Analisis Penyerapan dan Elastisitas Tenaga Kerja Sektor Industri di Kecil Kendari. Skripsi: Universitas Hasanuddin
- Syarifuddin, A. D. I. (2022). Service Quality and Online Customer Rating on F&B Purchase Decisions. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 15(2), 133-141.
- Syarifuddin, A. D. I., Basalamah, S., Sinring, B., & Mas’ud, M. (2021). The Effect of Marketing Mix on Consumer Purchase Intention and Decisions on Frozen Food in Makassar, Indonesia. *Am J Humanit Soc Sci Res*, 5(4), 32-40.
- Syatar, A. (2021). BAY AL SALAM AS FINANCING ALTERNATIVE DURING PANDEMIC OUTBREAK: A PROPOSAL TO INDONESIA. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 27, 1-7.
- Syatar, A., Rahman, A., Ilham, M., Mundzir, C., Arif, M., Hasim, H., & Amiruddin, M. M. (2020). Qurban innovation due to the Covid-19: Experiences from Indonesia. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(10), 1600-1614.
- Tijjjang, B., Nurfadhilah, N., Putra, P., Jayadi, U., & Ilham, R. (2022, August). The Influence of Product Quality and Purchase Decisions on Helmet LTD's Brand Image. In *Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021, 11-12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia*.
- Tim Pengembangan MKDK.(1995).Dasar-dasar Kependidikan: IKIP, Semarang Press
- Umar Tirtarahardja dan La Sulo.(1994).Pengantar Pendidikan.Jakarta : Depdikbud UU Slsdlknas. 2003
- Winardi. 1983. Pengantar Ilmu Ekonomi, Tarsito : Bandung
- Wirakartakusumah, Djuhari.1998. Bayang-Bayang Ekonomi Klasik Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud. Jakarta
- Wirasultafldjo, Kaloms, dkk. 1981. Pembangunan dan Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta
- Yunus, M., Muhammadun, M., Mahsyar, M., & Abubakar, A. (2022). Apropriasi Tradisi Mappanre Temme menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis (Studi Living Quran). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), 363-384.